KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Siklon tropis 93S ancam Indonesia Timur, aktifkan status siaga daerah
Tanggal : Minggu, 14 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Siklon Tropis 93S Ancam Indonesia Timur

Aktifkan Status Siaga Daerah

Senayan menyoroti peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Siklon itu berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

WAKIL Ketua Komisi V DPR PKB Syaiful Huda meminta Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan BMKG itu. Gunakan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.

"Jangan membantah atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG," kata Huda dalam keterangannya, Sabtu, (13/12/2025).

Dia menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jatim hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi itu harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.

"Harus ada antisipasi masyarakat di pesisir selatan Jatim, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob," ujar anggota Fraksi PKB itu.

Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu. "Masyarakat di wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak jadi korban bencana," katanya.

Legislator asal dapil Jabar VIII itu mendorong Pemerintah Pusat meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah jadi hal yang krusial.

"Pemerintah harus melakukan *early warning* berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan," ucapnya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Dia juga meminta Basarnas dan BNPB, termasuk BPBD untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

"Kami berharap mereka tidak kehilangan *golden time* saat bencana. Langkah cepat dan terukur sangat penting meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan," ujarnya.

FOTO: WEB PKB



Syaiful Huda

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menambahkan, Pemerintah harus segera memitigasi potensi tersebut dengan meningkatkan status waspada dan respons cepat. Fungsi koordinasi penanggulangan bencana tidak hanya berada di BNPB, tapi juga di BMKG sebagai lembaga peringatan dini nasional.

Ketika BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini, aka kewajiban berikutnya adalah memastikan publikasi yang cepat, jelas, dan masif pada Pemda, media, dan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan. "Jangan menunggu bencana membesar baru dilakukan langkah-langkah," kata politikus PDIP itu.

Dia juga mendorong BMKG segera memperkuat penyebaran informasi terkait bibit siklon itu. BNPB dan BPBD perlu langsung mengaktifkan status siaga di daerah-daerah yang diproyeksikan terdampak. "Kita tidak boleh mengulangi pengalaman di Sumatera di mana beberapa daerah belum siap secara logistik maupun koordinasi," ujarnya.

Pemda juga wajib melakukan upaya penyiapan lokasi pengungsian, edukasi masyarakat pesisir hingga pengecekan sistem drainase, dan langkah-langkah preventif lainnya. Pemda harus memastikan pemetaan rinci wilayah rawan bencana hingga level desa termasuk identifikasi kelompok rentan.

Selanjutnya, sosialisasi dan simulasi evakuasi harus rutin dilakukan, khususnya di pesisir dan bantaran sungai. Kemudian, sistem peringatan dini lokal juga perlu diperkuat melalui sirine, radio komunitas, dan kanal komunikasi cepat.

"Infrastruktur seperti jembatan, tanggul, jalur evakuasi, dan fasilitas kesehatan harus dicek secara berkala, sementara logistik kebencanaan disiagakan lebih awal di titik risiko tinggi," katanya.

Sebelumnya, BMKG mendeteksi bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia. BMKG mengimbau Pemda-masyarakat di Bali, NTB, NTT, dan Jawa meningkatkan waspada terhadap dampak bibit siklon 93S itu. Pemda diminta segera menyiapkan langkah mitigasi darurat, termasuk kesiapan jalur evakuasi, posko siaga bencana, serta koordinasi dengan aparat desa dan relawan.

BMKG meminta Pemda di wilayah berpotensi terdampak aktif menyebarkan informasi resmi BMKG pada masyarakat, tidak menunggu bencana datang. Dia juga mengimbau masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di sekitar sungai, tebing, dan pantai.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, bibit siklon tropis 93S mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang 1,25-2,5 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jatim hingga NTT, dan Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot (28 km/jam) dengan tekanan minimum 1009 hPa. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisasi dengan baik sehingga proses penguatan sistem diprakirakan berlangsung lambat dalam 24 jam. ■ PYB